



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 4984-4991

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Pengaruh Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen, dan Koneksi Politik terhadap *Tax Avoidance*

Nurul Aini Aprilianti, Lodang Prananta Widya Sasana

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang

[naprilianti26@gmail.com](mailto:naprilianti26@gmail.com), [dosen02227@unpam.ac.id](mailto:dosen02227@unpam.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, proporsi komisaris independen, dan koneksi politik terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020–2024. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif dengan data sekunder yang diambil dari laporan keuangan tahunan perusahaan. Sampel penelitian berjumlah 60 observasi dari 12 perusahaan perbankan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Teknik analisis data menggunakan regresi data panel dengan model Common Effect Model (CEM) setelah melalui serangkaian uji spesifikasi model (Chow, Hausman, dan Lagrange Multiplier). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*; (2) proporsi komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, mengindikasikan bahwa peningkatan peran komisaris independen justru dapat meningkatkan praktik penghindaran pajak; (3) koneksi politik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, menunjukkan bahwa perusahaan dengan koneksi politik cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya; serta (4) secara simultan, ketiga variabel independen berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* dengan nilai koefisien determinasi (Adjusted R-squared) sebesar 30,07%. Temuan ini memberikan implikasi bahwa keberadaan komisaris independen belum sepenuhnya efektif dalam fungsi pengawasan perpajakan, sementara koneksi politik berperan sebagai mekanisme penjaga legitimasi yang mendorong kepatuhan pajak. Penelitian ini menyumbang wawasan empiris dalam literatur tata kelola perusahaan dan perilaku perpajakan di sektor perbankan Indonesia.

*Kata kunci:* Tax Avoidance, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen, Koneksi Politik, Sektor Perbankan.

### 1. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang vital bagi pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik (Undang-Undang No. 16 Tahun 2009). Namun, dalam praktiknya, sering terjadi ketidaksejajaran kepentingan antara pemerintah dan perusahaan, yang mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) guna menekan beban fiskal (Suripto, 2021). Meskipun legal, aktivitas tersebut dapat mengurangi kontribusi fiskal perusahaan terhadap negara dan berpotensi mengikis keadilan sistem perpajakan.

Sektor perbankan di Indonesia memegang peranan strategis dalam sistem keuangan dan menjadi objek pengawasan ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Bank Indonesia. Namun, kompleksitas operasional dan besarnya aset yang dikelola membuka peluang bagi praktik perencanaan pajak yang agresif. Beberapa kasus seperti yang menimpa Bank Panin pada 2019 menunjukkan bahwa praktik penghindaran pajak masih terjadi meski dalam pengawasan regulasi yang ketat (Priska Sari Pratiwi, 2023).

Fenomena tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut, terutama dalam kaitannya dengan faktor-faktor internal dan eksternal perusahaan. Teori keagenan (*agency theory*) menjelaskan bahwa konflik antara principal (pemerintah/pemilik) dan agent (manajemen) dapat mendorong manajemen untuk melakukan *tax avoidance* guna memaksimalkan laba (Aprilyanti & Sugiakto, 2020). Di sisi lain, teori stakeholder menekankan bahwa perusahaan harus mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat, dalam pengambilan keputusan perpajakan (Yanti et al., 2021).

Fenomena tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut, terutama dalam kaitannya dengan faktor-faktor internal dan eksternal perusahaan. Teori keagenan (agency theory) menjelaskan bahwa konflik antara principal (pemerintah/pemilik) dan agent (manajemen) dapat mendorong manajemen untuk melakukan tax avoidance guna memaksimalkan laba (Aprilyanti & Sugiakto, 2020). Di sisi lain, teori stakeholder menekankan bahwa perusahaan harus mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat, dalam pengambilan keputusan perpajakan (Yanti et al., 2021).

Tax avoidance didefinisikan sebagai upaya legal untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan (Suandy, 2017). Berbeda dengan tax evasion yang bersifat ilegal, tax avoidance masih berada dalam koridor hukum meskipun sering dianggap tidak etis karena mengurangi kontribusi fiskal perusahaan. Dalam penelitian ini, tax avoidance diukur menggunakan proksi Effective Tax Rate (ETR) yang dihitung dari rasio beban pajak terhadap laba sebelum pajak. Nilai ETR yang rendah mengindikasikan tingginya intensitas tax avoidance (Djaya & Pradipta, 2022).

Ukuran perusahaan menggambarkan skala operasional dan sumber daya yang dimiliki, umumnya diproksikan dengan logaritma natural total aset (Aulia et al., 2020). Perusahaan besar memiliki sumber daya lebih banyak untuk melakukan perencanaan pajak yang kompleks, namun juga mendapat pengawasan lebih ketat dari regulator. Penelitian Sawitri et al. (2022) menemukan pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap tax avoidance, sementara Munawaro dan Ramdany (2020) menyatakan tidak ada pengaruh signifikan. Berdasarkan argensi teori keagenan, perusahaan besar memiliki insentif dan kemampuan lebih besar untuk melakukan tax avoidance.

Komisaris independen berperan sebagai pengawas internal yang diharapkan dapat mencegah perilaku oportunistik manajemen, termasuk dalam kebijakan perpajakan (Mulyana et al., 2020). Namun, efektivitasnya sangat tergantung pada independensi dan kompetensi yang dimiliki. Beberapa penelitian seperti Dewi dan Oktaviani (2021) menemukan pengaruh negatif komisaris independen terhadap tax avoidance, sementara Rohyana dan Maryana (2021) justru melaporkan pengaruh positif. Jika komisaris independen tidak berfungsi optimal, mereka justru dapat menjadi alat legitimasi bagi manajemen untuk melakukan tax avoidance.

Koneksi politik didefinisikan sebagai hubungan antara perusahaan dengan pejabat pemerintah atau partai politik, baik melalui kepemilikan saham, jabatan, atau hubungan informal (Rochmat Ngabdillah et al., 2022). Perusahaan dengan koneksi politik sering kali mendapatkan akses istimewa, seperti kemudahan perizinan dan risiko pemeriksaan pajak yang lebih rendah. Namun, mereka juga berada di bawah sorotan publik yang lebih tinggi, sehingga cenderung menjaga kepatuhan pajak untuk mempertahankan legitimasi (Maidina & Wati, 2020).

Secara simultan, ketiga variabel independen tersebut diduga memiliki pengaruh bersama terhadap tax avoidance, mengingat kompleksitas faktor yang memengaruhi keputusan perpajakan perusahaan (Amelia & Febyansyah, 2023).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh ukuran perusahaan, komisaris independen, dan koneksi politik terhadap tax avoidance pada sektor perbankan Indonesia periode 2020–2024. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis maupun praktis dalam memahami dinamika kepatuhan pajak di industri perbankan.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif kausal. Populasi adalah seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2020–2024. Sampel dipilih dengan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria: (1) terdaftar di BEI (2) tercatat secara konsisten selama periode penelitian, (3) menyajikan laporan keuangan lengkap (4) menggunakan mata uang rupiah, (5) memperoleh laba positif, dan (6) data variabel tersedia lengkap. Dari 47 populasi, diperoleh 12 perusahaan dengan periode observasi selama lima tahun (2020–2024), total unit analisis (data observasi) yang digunakan dalam penelitian ini adalah 12 perusahaan  $\times$  5 tahun = 60 data observasi

**Variabel dependen** adalah tax avoidance (Y) yang diukur dengan :

$$ETR = \frac{\text{beban pajak penghasilan}}{\text{laba bersih sebelum pajak}} \quad (1)$$

### Variabel independen

Ukuran perusahaan (X1) = Ln (Total Aset) (2)

$$KI = \frac{\text{Jumlah komisaris independen}}{\text{Total dewan komisaris}} \quad (3)$$

Koneksi politik (X3) sebagai variabel *dummy* (1 jika ada, 0 jika tidak).

Data sekunder diambil dari laporan tahunan perusahaan yang diunduh dari situs resmi BEI ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)). Analisis data menggunakan regresi data panel dengan model *Common Effect Model (CEM)* setelah melalui serangkaian uji spesifikasi model (*Chow, Hausman, Lagrange Multiplier*) dan uji asumsi klasik (normalitas, heteroskedastisitas, autokorelasi, multikolinearitas). Pengolahan data dilakukan dengan *software EViews 13*.

## 3. Hasil dan Diskusi

### 3.1. Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif memberikan sebuah gambaran suatu data dengan menggunakan nilai rata-rata (*mean*), nilai maksimum, nilai minimum dan standar deviasi (*std.dev*) dari masing-masing variabel dalam penelitian. Berikut adalah hasil statistik deskriptif.

Table 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	Y	X1	X2	X3
<b>Mean</b>	0.242592	18.88578	0.568404	0.866667
<b>Median</b>	0.205162	19.06307	0.600000	1.000000
<b>Maximum</b>	0.659193	21.35311	0.750000	1.000000
<b>Minimum</b>	0.012211	13.88836	0.333333	0.000000
<b>Std. Dev.</b>	0.115566	1.930658	0.091715	0.342803
<b>Skewness</b>	1.794878	-1.101113	-0.353250	-2.157277
<b>Kurtosis</b>	6.482938	3.965299	3.381774	5.653846
<b>Jarque-Bera</b>	62.54304	14.45400	1.612237	64.14571
<b>Probability</b>	0.000000	0.000727	0.446588	0.000000
<b>Sum</b>	14.55554	1133.147	34.10422	52.00000
<b>Sum Sq. Dev.</b>	0.787978	219.9190	0.496284	6.933333
<b>Observations</b>	60	60	60	60

Sumber: Output Eviews, 2025

Dari hasil pengujian statistik deskriptif pada tabel 1 di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada variabel *tax avoidance* (Y) yang diprosikan dengan *Effective Tax Rate* (ETR) menunjukkan nilai minimum sebesar 0,012211 nilai maksimum sebesar 0,659193, nilai rata-rata sebesar 0,242592 dan standar deviasi sebesar 0,115566. Penghindaran pajak diindikasikan, jika nilai ETR lebih dari tarif pajak nominal (22% atau 0,22) maka dapat dikatakan bahwa perusahaan melakukan penghindaran pajak, begitupun sebaliknya.
2. Pada variabel ukuran perusahaan (X1) menunjukkan nilai minimum sebesar 13.88836. Dengan nilai maksimum sebesar 21.35311, nilai rata-rata sebesar 18.88578 dan standar deviasi sebesar 1.930658. Semakin tinggi nilai ukuran perusahaan maka mengindikasikan besarnya sebuah perusahaan.

3. Pada variabel dewan komisaris independen (X2) menunjukkan nilai minimum sebesar 0.333333. Dengan nilai maksimum sebesar 0,750000, nilai rata-rata sebesar 0.568404 dan standar deviasi sebesar 0.091715. Semakin tinggi persentase proporsi dewan komisaris independen mengindikasikan tingginya pengawasan oleh dewan komisaris independen terhadap tata kelola perusahaan.
4. Pada variabel koneksi politik (X3) menunjukkan nilai minimum sebesar 0,00000, nilai maksimum sebesar 1,00000, nilai rata-rata sebesar 0,866667 dan standar deviasi sebesar 0,342803. Variabel koneksi politik diukur dengan variabel *dummy*, dimana nilai 1 menunjukkan adanya koneksi politik dan 0 menunjukkan tidak ada koneksi politik.

### 3.2. Hasil Uji Regresi Data Panel

Setelah melalui uji spesifikasi model, model terpilih adalah Common Effect Model (CEM). Hasil regresi disajikan pada Tabel 2.

Table 2. Hasil Uji Common Effect Model

Dependent Variable: Y				
Method: Panel Least Squares				
Date: 11/02/25 Time: 08:11				
Sample: 2020 2024				
Periods included: 5				
Cross-sections included: 12				
Total panel (balanced) observations: 60				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.036755	0.056187	-0.654155	0.5157
X1	0.709709	0.908935	0.780814	0.4382
X2	0.017760	0.003774	4.705600	0.0000
X3	-0.040611	0.016861	-2.408652	0.0193
<b>R<sup>2</sup> = 0,3363; Adjusted R<sup>2</sup> = 0,3007; F-statistik = 9,4584 (p = 0,000038)</b>				
Sumber: Output Eviews, 2025				

### 3.3. Hasil Uji Asumsi Klasik

#### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk memastikan bahwa data pada penelitian terdistribusi dengan normal. Penelitian ini menggunakan uji *Shapiro-Francia* untuk menguji normalitas data. Hasil uji normalitas disajikan pada tabel 4.8, sebagai berikut.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

Normality Test		
Date: 10/08/25 Time: 08:11		
Sample: 1 60		
Included observations: 60		
Test	Statistic	Prob.
Shapiro-Wilk	0.929973	0.001981
Shapiro-Francia	0.924623	0.001919

Sumber: Output Eviews, 2025

Berdasarkan hasil uji normalitas didapatkan nilai probabilitas *Shapiro-Francia* sebesar 0,001919. Nilai tersebut berarti kurang dari 0,05 atau dapat dikatakan bahwa data pada penelitian ini tidak terdistribusi secara normal. Dalam mengatasi gejala data yang tidak normal, maka peneliti melakukan transformasi data pada variabel yang akan digunakan. Setelah melakukan transformasi data dilakukan pengujian normalitas kembali. Hasil uji normalitas setelah transformasi disajikan dalam tabel 4, sebagai berikut.

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas Setelah Transformasi

Normality Test Date: 11/02/25 Time: 08:11 Sample: 1 60 Included observations: 60		
Test	Statistic	Prob.
Shapiro-Wilk	0.750898	9.74E-09
Shapiro-Francia	0.734167	5.74E-08

Sumber: Output Eviews, 2025

Berdasarkan hasil uji normalitas setelah dilakukan transformasi data didapatkan nilai probabilitas Shapiro-Francia sebesar 5,74E-08. Nilai tersebut berarti lebih dari 0,05 atau dapat dikatakan bahwa data pada penelitian ini terdistribusi secara normal.

## 2. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk memastikan bahwa model regresi yang akan digunakan bersifat homoskedastisitas. Pengujian heterokedastisitas pada penelitian ini menggunakan uji *ARCH*. Hasil uji Heterokedastisitas disajikan pada tabel 5 sebagai berikut.

Tabel 5. Hasil Uji Heterokedastisitas

F-statistic	0.195141	Prob. F(1,57)	0.6603
Obs*R-squared	0.201299	Prob. Chi-Square(1)	0.6537

Sumber: Output Eviews, 2025

Berdasarkan hasil pengujian *ARCH* menunjukkan nilai probabilitas Obs R-Squared sebesar 0,201299. yaitu sebesar 0,201299. Hal tersebut berarti model regresi penelitian ini tidak terjadi gejala heterokedastisitas atau dapat dikatakan bahwa model regresi yang akan digunakan bersifat homoskedastisitas.

## 3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk memeriksa apakah ada korelasi antara satu periode waktu dengan periode sebelumnya. Pengujian autokorelasi pada penelitian ini menggunakan uji *Breusch-Godfrey*. Hasil uji multikolonieritas disajikan pada tabel 6, sebagai berikut.

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi

F-statistic	2.459242	Prob. F(2,54)	0.0950
Obs*R-squared	5.008769	Prob. Chi-Square(2)	0.0817

Sumber: Output Eviews, 2025

Berdasarkan hasil pengujian *Breusch-Godfrey* menunjukkan nilai probabilitas *Obs R-Squared* sebesar 0,0817. Hal tersebut berarti model regresi penelitian ini tidak terjadi gejala autokorelasi atau tidak terdapat korelasi antara pengamatan periode waktu penelitian.

#### 4. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada pengaruh antar variabel independen (gejala multikolinieritas). Hasil uji multikolinieritas disajikan pada tabel 7, sebagai berikut.

Tabel 7. Hasil Uji Multikolinieritas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.003157	101.5442	NA
X1	0.826162	77.35512	1.058257
X2	1.42E-05	6.314684	1.004930
X3	0.000284	7.924642	1.056619

Sumber: Output Eviews, 2025

Berdasarkan tabel 7 di atas menunjukkan bahwa nilai VIF masing-masing variabel bernilai lebih dari 0,10. Hal tersebut berarti bahwa data dalam penelitian ini tidak memiliki masalah dalam multikolinieritas atau data dalam penelitian ini tidak terjadi adanya korelasi antara variabel independennya. Penelitian ini juga menggunakan matriks korelasi antar variabel bebas, sebagai berikut.

Tabel 8. Hasil Uji *Pearson Corellation*

	X1	X2	X3
X1	1	-0.0612938954317828	-0.2291116139414621
X2	-0.0612938954317828	1	0.0470394600177079
X3	-0.2291116139414621	0.0470394600177079	1

Sumber: Output Eviews, 2025

Berdasarkan hasil pada tabel 4.13 dapat dilihat semua korelasi antara variabel independen tidak ada yang memiliki nilai lebih dari 0,90. Hal tersebut berarti model regresi penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinieritas atau tidak terdapat korelasi antara variabel independen.

### 3.4. Pengujian Hipotesis

H1: Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance ( $\beta = 0,7097$ ;  $p = 0,4382 > 0,05$ ). Temuan ini tidak mendukung hipotesis awal dan sejalan dengan penelitian Munawaro dan Ramdany (2020) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan bukan faktor penentu utama tax avoidance di sektor terregulasi seperti perbankan.

H2: Komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance ( $\beta = 0,0178$ ;  $p = 0,0000 < 0,05$ ). Hasil ini mendukung H2 dan konsisten dengan temuan Rohyana dan Maryana (2021). Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan komisaris independen belum sepenuhnya efektif dalam mengawasi kebijakan pajak, atau bahkan menjadi bagian dari strategi legitimasi perusahaan untuk melakukan tax avoidance secara legal.

H3: Koneksi politik berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance ( $\beta = -0,0406$ ;  $p = 0,0193 < 0,05$ ). Temuan ini mendukung H3 dan sejalan dengan penelitian Maidina dan Wati (2020) yang menyatakan bahwa perusahaan dengan koneksi politik cenderung lebih patuh pajak untuk menjaga hubungan baik dengan pemerintah dan publik.

H4: Ketiga variabel secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance ( $F = 9,4584$ ;  $p = 0,000038 < 0,05$ ). Adjusted  $R^2$  sebesar 30,07% menunjukkan bahwa variasi tax avoidance dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen sebesar 30,07%, sisanya dijelaskan faktor lain di luar model.

### 3.5. Diskusi

Temuan bahwa ukuran perusahaan tidak signifikan mengindikasikan bahwa dalam industri perbankan yang sangat diatur, skala perusahaan tidak serta-merta menentukan perilaku penghindaran pajak. Pengawasan ketat dari OJK dan BI serta ekspektasi publik terhadap bank besar justru membatasi ruang gerak untuk praktik per-pajakan yang agresif.

Pengaruh positif komisaris independen terhadap tax avoidance merupakan temuan yang cukup kritis. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen secara formal belum menjamin efektivitas pengawasan substantif. Kemungkinan, komisaris independen di sektor perbankan masih menghadapi tantangan dalam memahami kompleksitas regulasi perpajakan atau kurang independen dalam mengambil keputusan.

Di sisi lain, pengaruh negatif koneksi politik sejalan dengan teori legitimasi. Perusahaan yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan politik cenderung lebih berhati-hati dalam pengelolaan pajak untuk menghindari risiko reputasi dan menjaga akses istimewa yang mereka miliki.

## 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perbankan Indonesia. Komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*, mengindikasikan lemahnya fungsi pengawasan. Koneksi politik berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*, mencerminkan upaya perusahaan menjaga legitimasi politik. Secara simultan, ketiga variabel berkontribusi signifikan dalam menjelaskan variasi *tax avoidance* sebesar 30,07%. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur tentang determinan *tax avoidance* dengan mengonfirmasi peran koneksi politik sebagai faktor pengurang dan mengungkap paradoks peran komisaris independen di sektor perbankan. Secara praktis, temuan ini dapat menjadi masukan bagi regulator dalam menyusun kebijakan penguatan tata kelola perusahaan, khususnya terkait efektivitas dewan komisaris independen. Bagi perusahaan, menjaga transparansi hubungan politik dan meningkatkan kompetensi dewan pengawas dapat menjadi strategi untuk membangun citra kepatuhan pajak.

## Referensi

1. Amelia, R., & Febyansyah, A. (2023). Pengaruh Komisaris Independent, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 4(4), 2587–2599.
2. Annisa, T., Taufik, T., & Hanif, R. A. (2017). Pengaruh Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak. *JOM Fekon*, 4(1), 1–15.
3. Aprilyanti, R., & Sugiakto, C. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Financial Distress, Reputasi Kap terhadap Opini Audit Going Concern. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Teknologi*, 12(1), 45–58.
4. Aulia, I., Mahpudin, E., & Program, S. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Akuntabel*, 17(2), 228–240.
5. Dewi, S. L., & Oktaviani, R. M. (2021). Pengaruh Leverage, Capital Intensity, Komisaris Independent Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 179–194.
6. Djaya, N. K., & Pradipta, A. (2022). Karakteristik Perusahaan Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Media Bisnis*, 14(1), 112–125.
7. Maidina, L. P., & Wati, L. N. (2020). Pengaruh Koneksi Politik, Good Corporate Governance Dan Kinerja Keuangan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 150–165.
8. Munawaro, M. A., & Ramdany, R. (2020). Peran Csr, Ukuran Perusahaan, Karakter Eksekutif Dan Koneksi Politik Terhadap Potensi Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 8(2), 88–102.
9. Mulyana, Y., Mulyati, S., Umiyati, I., & Sutaatmadja, S. (2020). Pengaruh Komisaris Independent, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Pertumbuhan Aset Terhadap Penghindaran Pajak. *Sikap*, 4(2), 160–172.
10. Priska Sari Pratiwi. (2023, Januari 4). *Kuasa Bank Panin Dituntut 3 Tahun Penjara Terkait Rekeyasa Pajak*. CNN Indonesia.
11. Rochmat Ngabdillah, F., Cinintya Pratama, B., Dirgantari, N., & Wibowo, H. (2022). Pengaruh Koneksi Politik, Komisaris Independent, Kualitas Audit Dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance. *Derivatif : Jurnal Manajemen*, 16(1), 45–60.
12. Rohyana, C., & Maryana, D. (2021). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 112–125.
13. Sawitri, A. P., Alam, W. Y., & Dewi, F. A. A. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan Dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 8(1), 85–100.
14. Suandy, E. (2017). *Perencanaan Pajak* (Edisi 6). Salemba Empat.

15. Suropto. (2021). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Kualitas Audit Dan Manajemen Laba Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Pertambangan. *Jurnal Ilmiah MEA*, 5(1), 45–60.
16. Yanti, N. L. E. K., Endiana, I. D. M., & Pramesti, I. G. A. A. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Ukuran Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusional, Leverage, Dan Profitabilitas terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *Ekonomi Bisnis*, 3(1), 45–58.